BAB IV
HASIL PEMILIHAN UMUM 1955

A. Hasil Pemungutan Suara

Hasil Pemilihan Umum tahun 1955 sebagai pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di negara kita sangat menarik perhatian masyarakat terutama ahli hukum Tata Negara baik dalam maupun luar negeri, sebab mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan ketatanegaraan, pemerintah, khususnya sistem demokrasi dan sistem kepartaian. Pada umumnya hasil pemilihan umum 1955 dirasakan masih kurang bagus, karena belum sesuai dengan harapan-harapan yang diharapkan dan telah lama ditunggu-tunggu. Namun sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan mawas diri dan untuk diambil manfaat dari pengalaman adalah sangat berguna, seperti Herbert Feith mengatakan bahwa Pemilihan Umum tahun 1955 di Indonesia sangat menarik dan merupakan suatu eksperimen dalam pelaksanaan demokrasi, menarik perhatian mengenai mekanisme politik, yang menentukan dasar-dasar politik di Indonesia serta bahan analisa masyarakat.[1]

Pada 29 September 1955 lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65 persen dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara secara sah. Karena kesulitan komunikasi dan administrasi serta persoalan-persoalan khusus di daerah-daerah yang mengalami gangguan

---

[1] Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi,* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1981, hlm. 26.

keamanan, mustahil menyelenggarakan pemungutan suara pada hari yang sama di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan. Di 26 kabupaten pemungutan suara bisa dimulai tepat pada 29 Sepetember, tetapi baru selesai untuk seluruh kabupaten itu beberapa hari kemudian, dan di 8 kabupaten lainnya pemungutan suara baru bisa diadakan sesudah tanggal 29 September. Tetapi, pemungutan suara tepat pada 29 September dapat sekurang-kurangnya 85 persen dari lebih kurang 93.532 tempat pemungutan suara, dan diselesaikan seluruhnya pada 29 November.[2]

Untuk membantu Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara menjaga keamanan di tempat pemungutan suara, dibentuk regu pengaman atau pembantu polisi yang disebut Pembantu Keamanan Pemungutan Suara. Satu regu pengaman terdiri dari tiga sampai lima orang untuk setiap tempat pemungutan suara, biasanya diambil dari penjaga keamanan desa dan terkadang dari partai-partai. Tanggung jawab membentuk kelompok ini berada di tangan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang terdiri atas bupati dan pejabat lain di tingkat kabupaten, seperti komandan tentara, kepala polisi, dan kepala kejaksaan negeri. Wewenang Pembantu Keamanan Pemungutan Suara terbatas sekali, karena mereka tidak dipersenjatai, kecuali dengan pentungan, dan tidak boleh memasuki wilayah tempat pemungutan suara, kecuali kalau dipanggil oleh ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pemungutan suara diselenggarakan di berbagai tempat, biasanya di gedung-gedung umum seperti sekolah atau di bangunan murah dari bambu yang

---

[2] Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hlm. 57-58.

didirikan di tempat-tempat umum khusus untuk keperluan pemungutan suara, tetapi kadang-kadang juga di rumah tokoh-tokoh desa. Rata-rata ada dua sampai tiga tempat pemungutan suara di satu desa. Menurut instruksi Panitia Pemilihan Indonesia, harus ada satu tempat pemungutan suara untuk setiap 300 dan 1000 orang pemilih. Pada prakteknya, di beberapa daerah lebih dari 1000 pemilih harus memberikan suara di satu tempat pemungutan suara, meski jumlah rata-rata adalah 460. Banyak pemilih dari desa-desa terpencil di pulau-pulau yang jarang penduduknya harus berjalan tujuh kilometer atau lebih ke tempat pemungutan suara, dan banyak pula yang harus berlayar ke pulau tetangga yang jauh letaknya.[3] Walaupun demikian, tidak ada indikasi bahwa ada orang yang menolak datang ke tempat pemungutan suara karena sebab ini.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum diimbangi dengan efektivitas pengaturan keamanan yang dibuat untuk itu. Di bagian-bagian tertentu di Indonesia seperti Priangan Timur (Jawa Barat), Aceh dan daerah-daerah yang tidak aman di Sulawesi Selatan, tempat yang dapat diduga dengan cukup beralasan bahwa pemilihan umum akan dikacaukan oleh Darul Islam, diambil langkah-langkah untuk mencegah kekacauan itu agar pemilihan umum dapat berjalan dalam suasana yang sebebas-bebasnya. Hailnya pemberontakan di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh tidak melakukan apa-apa untuk mengganggu pemungutan suara di daerahnya. Kelompok Darul Islam Jawa Barat di bawah Kartosuwiryo mengeluarkan ancaman keras terhadap orang yang memberikan suara. Akan tetapi, kecuali beberapa kasus pembakaran tempat pemungutan suara

---

[3] *Ibid,*. hlm. 59.

dan rumah, tidak ada tindakan teror yang cukup penting dilaporkan dari daerah mereka selama masa pemilihan umum.

Sebaliknya di Sulawesi Selatan di bawah Kahar Muzakar cukup berhasil melaksanakan keputusan politiknya untuk secara aktif mengacaukan pemilihan umum. Lima orang tentara dan petugas tempat pemungutan suara mereka bunuh pada 29 September. Beberapa lainnya mereka culik dan ada beberapa tempat pemungutan suara dibakar. Surat suara dan kotak suara di kabupaten Makassar, Pare-Pare dan Donggala dicuri. Itulah sebabnya Sulawesi Selatan dan Tenggara menjadi daerah pemilihan dengan partisipasi pemilih yang paling rendah hanya 71,4 persen dari pemilih terdaftar yang memeberikan suara dalam pemilihan umum parlemen.[4] Di luar daerah-daerah yang bergolak, pemilihan umum berlangsung dengan sangat tertib tanpa insiden yang berarti.

Segi yang jauh lebih rumit dari pemungutan suara adalah soal seberapa bebas pemilih memberikan suaranya. Pengadilan di Surabaya, Kudus (Jawa Tengah), dan Padang Sidempuan (Sumatera Utara) memeriksa kasus-kasus penggunaan surat panggilan oleh orang-orang tidak berhak. Di pulau Lombok (Nusa Tenggara Barat), seorang ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dilaporkan membolehkan surat suara dibawa pergi dari tempat pemungutan suara. Di Garut, Jawa Barat polisi menangkap seorang anggota Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara yang memberi tanda pada 34 surat suara. Pemungutan suara

---

[4] Angka untuk Sumatera Utara adalah 86,3 persen. Di Jawa Barat suara yang sah diberikan oleh 88,2 persen dari pemilih yang terdaftar. Perlu ditambahkan, di tiga daerah pemilihan ini ada basis pemberontak, dan tidak bisa mengadakan pendaftaran pemilih disitu pada 1954. Tidak ada perkiraan mengenai jumlah orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat masalah itu.

terpaksa diulang di berbagai tempat pemungutan suara di berbagai daerah, bukan hanya karena kelemahan teknis seperti surat suara berlubang-lubang atau surat suara untuk suatu daerah pemilihan diberikan kepada daerah pemilihan lain, tetapi juga karena penyalahgunaan yang melibatkan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.[5]

Laporan-laporan mengenai intimidasi pada tahap akhir kampanye dan pada hari pemungutan suara datang dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Tetapi ada dua tempat yang menonjol dalam hal ini. Pertama, banyak pemilih merasa ditekan untuk memilih Masyumi di berbagai tempat di Aceh dan di Jawa Barat dimana kekuatan Darul Islam harus diperhitungkan. Kedua, di berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, intimidasi banyak sekali dan luas yang dilakukan oleh lurah-lurah PNI dan pembantu mereka, dan di tingkat yang lebih rendah oleh orang-orang Komunis penjaga keamanan desa.[6]

Harus diakui tidak semua tempat pemilihan umum berjalan dengan mulus, khususnya di tempat-tempat yang jalur komunikasi dan transportasinya belum lancar. Namun secara umum dapat dikatakan kedua pemilihan umum itu. 29 September 1955 dan 15 Desember 1955, berjalan sesuai dengan rencana. Sesudah pemilu terlaksana, tekanan-tekanan politis maupun psikologis menurun drastis. Suasana intimidatif berubah menjadi suasana menjadi suasana partisipatif. Rakyat dengan bebas menentukan pilihan mereka. Pada hari-hari itu mereka sadar bahwa nasib tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor luar dari diri mereka. Pada umumnya

---

[5] *Ibid*., hlm. 64.

[6] *Ibid*., hlm 68.

masyarakat merasa bangga bahwa mereka baru saja ikut berperan serta dalam sebuah momen bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa.[7]

Pemilihan umum untuk Konstituante berlangsung pada 15 Desember 1955. Kampanye untuk pemilihan umum kedua ini hanya sedikit terlambat dimulai, yakni pada pertengahan sampai akhir November dan di beberapa tempat baru dimulai Desember. Selain itu, intensitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kampanye untuk pemilihan umum 29 September. Meskipun banyak pernyataan pemerintah dan para juru bicara partai yang mengatakan Konstituante lebih penting dari Parlemen, tampaknya pemimpin partai tidak yakin kekuasaan badan itu sama dengan kekuasaan badan legislatif yang biasa.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pemilihan umum Parlemen, Panitia Pemilihan Indonesia mengeluarkan sejumlah instruksi baru mengenai bidang teknis dan kelembagaan untuk pemilihan Konstituante. Jumlah tempat pemungutan suara meningkat tidak akan ada yang harus melayani lebih dari 750 pemilih. Ketentuan-ketentuan baru dibuat untuk memudahkan pemilih memberikan suara tanpa harus hadir. Serangkaian ketentuan baru yang rumit menghapuskan berbagai kelemahan dalam pemilihan umum Parlemen yang menyangkut pengiriman surat panggilan. Juga ada ketentuan yang menetapkan penghitungan semua suara pemilih dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara Kecamatan dan juga oleh Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara. Ketentuan yang paling penting dari semua instruksi ini adalah yang mengakhiri kegagalan paling parah pada sistem pemberian suara dalam pemilihan umum 29 September,

---

[7] Baskara T. Wardaya, *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*, Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

yaitu yang menyangkut perlunya memasang tirai setinggi leher di bagian belakang bilik pemberian suara.[8]

Pemilihan umum Konstituante juga boleh dikatakan bebas dari intimidasi yang banyak terjadi di daerah tertentu dalam pemilihan umum Parlemen. Sejumlah Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara terlibat dalam beberapa kecurangan pada hari pemungutan suara, tetapi bukti-bukti yang ada menunjukan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pemungutan suara pertama. Pemungutan suara ulang juga lebih sedikit, tetapi yang lebih penting intimidasi sebelum hari pemungutan suara jumlahnya jauh lebih kecil. Ini sebagian karena intensitas kampanye lebih rendah. Sebagian lagi hal itu karena langkah-langkah yang diambil oleh kabinet Burhanudin Harahap pada masa antara kedua pemilihan umum itu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah demi kepentingan partai. Yang tidak kurang penting lagi adalah bahwa pemungutan suara secara rahasia semakin terjamin dengan adanya bilik suara yang tertutup.

Namun demikian, perbedaan yang paling mencolok antara dua pemilihan umum ini terletak pada suasana. Pada pemilihan umum kedua hampir tidak ada desas desus yang menggelisahkan, sedang ketegangan selama masa penantiannya jauh berkurang. Banyak pemilih rela menempuh jarak yang jauh untuk mencapai tempat pemungutan suara, tetapi banyak pemilih yang melakukannya pada 29 September tidak lagi melakukannya pada pemilihan umum kedua. Sebagian besar dari golongan ini adalah mereka yang tidak mau memanfaatkan kemudahan baru yang terkandung dalam ketentuan mengenai pemberian suara tanpa harus hadir

---

[8] Herbert Feith, *op.cit*, hlm. 80.

(absente voting). Pada hari pemilihan umum kegiatan perdagangan juga tidak banyak, dan angkutan umum juga sangat sedikit, tetapi tidak sampai seluruh kegiatan berhenti seperti pada hari pemilihan umum 29 September. Pemberian suara sekarang lebih bersifat urusan pribadi, bukan lagi menjadi urusan bersama dan banyak pemilih yang segera meninggalkan tempat pemungutan suara begitu selesai memberikan suara.

B. Analisis hasil pemilihan umum

Hasil keseluruhan yang diperoleh partai-partai dalam pemilihan umum parlemen dipaparkan dalam tabel berikut ini.[9]

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4

[9] http://mylovelyhomework11.blogspot.com/2012/05/*analisis-memahami-pemilu-indonesia.html* diakses tanggal 31 Mei 2014

11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Gerinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Hasil penghitungan suara dalam Pemilu tahun 1955 menunjukkan bahwa PNI dan Masyumi mendapatkan jatah kursi yang sama sehingga tidak ada yang menang mutlak dalam pemilihan umum tahun 1955. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi dan dikalahkan oleh PNI.

IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) adalah "perkumpulan pemilih", suatu organisasi yang dibentuk pada 1954 khusus tujuan untuk bertarung dalam pemilihan umum. Dipimpin oleh sekelompok perwira tinggi angkatan darat dan veteran perwira, dari sisi pandangan politik banyak dianggap menyerupai Partai Sosialis dan Partai Nasionalis. Calonnya yang utama di sejumlah daerah adalah Kolonel A.H. Nasution, bekas panglima Angkatan Darat, yang diberhentikan dari dinas aktif karena terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952 dan dipulihkan lagi kedudukannya tidak lama setelah pemilihan umum parlemen. GPPS (Gerakan Pembela Pancasila Sakti) juga dibentuk khusus untuk pemilihan umum, dan juga pada 1954. Bentuk dan perkembangannya terkait erat dengan sosok bekas pemimpin PNI di Jawa Barat Gatot Mangkupraja.[10] Oleh PNI, partai ini dianggap sejenis organisasi front. Calon-calon GPPS banyak terdiri

[10] *Ibid.*, hlm 86

dari pejabat pemerintah yang juga anggota PNI. Tetapi perselisihan yang muncul pada 1955 antara Gatot dan pimpinan pusat PNI mengubah orientasi politik oranisasi ini. Sekarang organisasi ini bisa digolongkan kelompok partai-partai pribadi nasionalis dengan sikap politik yang kurang jelas, seperti PRN Mr. Djody Gondokusumo, PIR Mr Wongsonegoro, PIR Prof Hazairin, Partai Buruh Proffesor S.M. Abidin dan Asrarudin, serta PRI Sutomo.

Penghitungan suara untuk pemilihan umum bulan September selesai pada tanggal 29 November 1955, dengan hasil yang memunculkan banyak kejutan bagi para pemimpin politik maupun masyarakat. Dari sekitar tiga puluhan partai yang ikut, ternyata hanya ada empat partai yang mendapat perolehan suara lebih dari 16 persen. Partai-partai lain hanya mendapat kurang dari 3 persen. Partai-partai yang masuk kategori empat besar untuk perolehan suara adalah: PNI memperoleh 22,3 persen. Masyumi memperoleh 20,9 persen, NU memperoleh 18,4 persen dan PKI diluar dugaan mendapatkan 16,4 persen.Empat partai lain yang mendapat suara 2 persen atau lebih adalah PSII, Parkindo, Partai Katholik dan PSI. Partai-partai yang lain hanya mendapat suara yang jauh lebih kecil, termasuk Nasution (IPKI) yang hanya memperoleh 1,4 persen suara.[11]

Permai, Gerinda, serta R. Soedjono Prawirosoedarso dan kawan-kawan adalah kelompok mistik di Jawa. Dari semua ini, Permai berumur paling panjang sebagai organisasi politik, dengan pendukung yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dekat dengan Partai Komunis. Gerinda organisasi lama bagi kelompok bangsawan Yogyakarta, R. Soedjono seorang guru mistik berusia

---

[11] Baskara T. Wardaya, *op.cit*., hlm.13

lanjut dari Madiun. Acoma (Angkatan Communis Muda) adalah organisasi dengan pandangan politik yang dekat dengan Partai Murba yang berhaluan komunis-nasional. Satu-satunya kelompok kesukuan yang berhasil dalam pemilihan umum Parlemen adalah Partai Persatuan Daya dari Kalimantan Barat. PRD (Partai Rakyat Desa) dan PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka), meski tidak terang-terangan bersifat kesukuan atau kedaerahan, adalah partai dari satu daerah yakni Jawa Barat. Semua enam organisasi politik yang berhasil dalam pemilihan umum Konstituante, tetapi tidak beerhasil dalam pemilihan umum Parlemen, bersifat kesukuan atau kedaerahan dalam arti tertentu. Gerakan Pilihan Sunda di Jawa Barat bersifat kesukuan, dan lainnya PIR Nusa Tenggara Barat yang kuat di Lombok bersifat kedaerahan. Tiga lainnya, Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan kelompok guru mistik Cirebon Raja Keprabonan dan kawan-kawan, adalah kelompok Jawa Barat, sedang Pusat Penggerak Pencalonan L.M Idrus Effendi memperoleh suara hampir seluruhnya dari kabupaten di Sulawesi Tenggara.[12]

Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang menbdapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

---

[12] Herbert Feith, *op.cit.*, hlm. 87.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante:[13]

No.	Partai/Nama Daftar	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2

[13] http://mylovelyhomework11.blogspot.com/2012/05/*analisis-memahami-pemilu-indonesia.html* diakses tanggal 31 Mei 2014

18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)	39.874	0,11	
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
35.	Lain-lain	426.856	1,13	
Jumlah		37.837.105		514

Ternyata pemilihan umum telah menambah jumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat, dan karenanya tidak satupun partai politik yang memperoleh wakil secara mayoritas, akibatnya dalam pembentukan Kabinet berikutnya masih terpaksa diadakan dengan koalisi dari berbagai partai politik. Pemilihan umum yang dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan partai politik tidak pernah tercapai.Walaupun demikian, ditinjau dari sudut pelaksanaan pemilihan umum tersebut, semua pihak merasa puas dalam arti pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertulis, mulai dari saat kampanye sampai pada pemberian suara dan ternyata tidak terdengar keluhan bahwa telah dilanggar hak-hak asasi warga negara.[14]

Parlemen hasil pemilihan umum jelas tidak menghasilkan stabilitas politik, dan kenyataan ini menimbulkan kekecewaan yang semakin besar terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Tetapi, pemilihan umum menghasilkan hal-hal lain yang diharapkan para pemimpin Indonesia. Nilainya sebagai pendidikan politik sangat besar, pemahaman tentang politik tingkat nasional oleh penduduk desa-desa di Indonesia sangat meningkat. Pemilihan umum juga menghasilkan pemahaman yang lebih besar di Jakarta tentang desa di Indonesia dan menyingkapkan sejumlah mitos politik dan sosiologis yang sebelumnya diterima oleh para perencana sosial dan para politisi di ibukota.

---

[14] Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1981, hlm. 89.

Pemilihan umum 1955 memperlihatkan Indonesia menghadapi sejumlah persoalan khusus dalam upayanya menyesuaikan teknik pemilihan umum sesuai kebutuhannya. Terkait dengan ini adalah kesulitan besar menjaga agar aparat pemerintah daerah dan lokal tidak campur tangan politik partai. Hal penting berikutnya yang membuat pemilihan umum 1955 di Indonesia berbeda dari pemilihan umum di kebanyakan negara Barat ialah besarnya perbedaan antara soal-soal nasional di satu tingkat desisi dengan seruan-seruan kampanye tingkat desa di sisi lainnya, dan rendahnya tingkat kepekaan pemilih terhadap perkembangan politik di tingkat nasional.[15]

Pemilihan umum menimba dari sumber-sumber baru kepemimpinan dan menyediakan tempat bagi wakil-wakil sejumlah kelompok sosial yang sebelumnya tidak terwakili. Pemilihan umum membantu memperkuat kesadaran seluruh rakyat Indonesia karena memberikan pada kelompok-kelompok masyarakat rasa turut memainkan peran dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Pemilihan umum juga bernilai untuk penerangan ke luar negeri. Bahwa pemilihan umum ini diselenggarakan dengan sukses, merupakan bukti nyata bagi kebenaran kaum nasionalis Indonesia dalam menghadapi pihak-pihak yang bersikeras mengatakan orang Indonesia belum mampu menjalankan pemerintahan sendiri.

Konstituante mempunyai tugas untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dewan itu mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Namun sampai tahun 1958 dewan itu belum menunjukan

---

[15] Herbert Feith, *op.cit.*, hlm 132.

kemampuan apapun. Sidang diwarnai oleh perdebatan yang berkepanjangan sehingga kesepakatan merumuskan UUD selalu menemukan jalan buntu. Kenyataan itu menimbulkan krisis politik di dalam negeri. Krisis itu diperburuk oleh gejala pembengkakan di daerah seperti pemberontakan PRRI dan permesta.

Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamandemen dengan memasukkan kata–kata : "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya" kedalam Pembukaan UUD 1945. Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265 (menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

Bagi kalangan mliliter, terutama angkatan darat, kemacetan konstituante dalam merumuskan UUD dan menanggapi tawaran Presiden dapat menjerumuskan negara dalam bahaya perpecahan. Pendapat itu memang beralasan karena negara sedang menghadapi masalah keamanan yang amat berat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara kepala staf angkatan darat, Letnan Jenderal A.H. Nasution, mengeluarkan larangan itu dikeluarkan atas nama pemerintah. Larangan itu di tindak lanjuti oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan suatu dekrit. Dekrit tersebut akibat pembubaran konstituante dan pemberlakuan kembali

UUD 1945. Tindakan Presiden tersebut mendapat sambutan dari kalangan militer, semua politisi, dan masyarakat yang telah jenuh dengan tidak kunjung selesainya krisis politik dan ekonomi dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.